

# Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia

Marsella Putri<sup>1</sup>, Evada Dewata<sup>2</sup>, Yuli Antina Aryani<sup>3</sup>

Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya<sup>1,2,3</sup>

[marsellaaa12@gmail.com](mailto:marsellaaa12@gmail.com)

---

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 28 September 2024

Received in revised form 12 Nov 2024

Accepted 15 November 2024

Available online 1 Desember 2024

## ABSTRACT

This study aims to determine how fiscal stress is affected by diversification of regional income and balancing funds. The type of data used is quantitative. Using data collected over a five-year period (2018-2022), this study analyses 145 samples from 29 provinces in Indonesia. The panel data estimation used is the Fixed Effect Model (FEM). The data was analysed using the classical assumption test data analysis method. The findings of this study indicate that: (1) Regional Revenue Diversification partially has no effect on Fiscal Stress (2) Balance Fund partially has a positive and significant effect on Fiscal Stress (3) Regional Revenue Diversification and Balance Fund simultaneously affect Fiscal Stress by 96.49% positively and significantly.

**Keywords:** Regional Revenue Diversification, Balance Fund, Fiscal Stress

---

## 1. LATAR BELAKANG

Adanya pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001 menyebabkan perubahan pada kebijakan pemerintah yang awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, dan salah satu sumber anggaran tersebut yang termasuk dalam postur APBN adalah dana perimbangan. Defisit pada APBN merupakan hambatan yang selalu ada bahkan meningkat dalam APBN.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada nota keuangan RAPBN, perkembangan defisit APBN di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Adanya defisit APBN disebabkan karena belanja negara yang lebih besar daripada penerimaan negara. Masalah ini akan menyebabkan tekanan fiskal (*fiscal stress*) pada APBN yang dapat berasal dari risiko kewajiban kontinjensi pemerintah, deviasi APBN, dan beberapa risiko fiksial.

Menurut Septi Suryani (2023), *fiscal stress* merupakan tekanan anggaran yang disebabkan oleh terbatasnya pendapatan daerah yang dapat memberi dampak secara signifikan pada penyediaan layanan publik. Dinapoli (2017) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* merupakan penilaian keadaan keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan keadaan khusus. Adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap potensi dan kapasitas fiskal yang dimilikinya sebagai tujuan agar pemerintah daerah tersebut dapat memperkecil ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kondisi tersebut akan mangakibatkan tingkat *fiscal stress* semakin meningkat dan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah saat mengalokasikan dan mengelola anggaran untuk pembangunan daerah. Penurunan aktivitas ekonomi daerah tertentu juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah tersebut, yang membuat daerah tersebut hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat dan kondisi ini menunjukkan adanya gejala *fiscal stress* (Firstanto, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Muryawan & Sukarsa (2016)

---

Received September 4, 2024; Revised Nov 12, 2024; Accepted Nov 15, 2024

menemukan bahwa pemerintah daerah tidak dapat membiayai pembangunan dan peningkatan kemandirian karena keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran, sehingga menyebabkan *fiscal stress*. Jika daerah mengalami tekanan anggaran pada tahun sebelumnya, maka untuk menyusun anggaran untuk tahun berikutnya pemerintah harus lebih berhati-hati agar krisis keuangan tidak terulang kembali.

Pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, salah satunya yaitu diversifikasi pendapatan daerah. Icih, dkk. (2021) menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan dari aktivitas ekonomi, maka pemerintah daerah harus dapat mendiversifikasi pendapatan daerahnya sehingga pendapatan daerah tidak terbatas pada satu sektor pendapatan saja. Penelitian terkait diversifikasi pendapatan daerah yang dilakukan oleh Shamsub & Akoto (2004), Mahifa, dkk. (2010), dan Adriana, dkk. (2017) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* dipengaruhi secara negatif oleh diversifikasi pendapatan daerah. Akan tetapi Icih, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* tidak dipengaruhi oleh diversifikasi pendapatan daerah.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi tingkat *fiscal stress* yakni dana perimbangan. Penelitian terkait dana perimbangan yang dilakukan oleh Septi Suryani (2023), Daniela & Muryani (2019) dan Aman (2017) memperoleh temuan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitorini, dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap *fiscal stress*. Akan tetapi pada penelitian Ulfia, dkk. (2021) dan Lhutfi, dkk. (2019) yang menyimpulkan bahwa *fiscal stress* tidak dipengaruhi oleh dana perimbangan.

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, dengan mengambil sampel menggunakan data dari tahun 2018 hingga tahun 2022 (5 tahun anggaran). Penelitian ini tidak menggunakan seluruh variabel pada penelitian sebelumnya, melainkan mengganti dengan variabel lain yang berbeda. Tujuan dari penelitian menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh diversifikasi pendapatan daerah terhadap *fiscal stress*, untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap *fiscal stress*, serta untuk mengetahui pengaruh diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan pengaruh terhadap *fiscal stress*.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

(Davis et al., 1997) mengemukakan teori stewardship yang menjelaskan hubungan antara *stewards* dan *principals*. Teori ini mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan masyarakat dan kesuksesan organisasi. Menurut teori ini, manajemen dianggap sebagai pihak yang berintegritas tinggi dan dengan penuh bertanggung jawab dalam bertindak untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi (Puspitawati, 2016).

Melalui teori stewardship, pengoptimalan pengelolaan keuangan publik dan peningkatan efisiensi penggunaan dana dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik. Penelitian ini menggunakan teori stewardship untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, pemerintah daerah dapat memenuhi aspirasi masyarakat, menyediakan layanan yang baik, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang dititipkan masyarakat kepada pemerintah.

### ***Fiscal Stress***

Tekanan anggaran karena adanya pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan belanja dikenal sebagai *fiscal stress* (Arnett, 2011). *Fiscal stress* terjadi karena belanja lebih banyak daripada pendapatan. *Fiscal stress* terjadi karena belanja lebih banyak daripada pendapatan. Adanya tuntutan untuk menjadi lebih mandiri, yang ditandai oleh adanya peningkatan penerimaan sendiri yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran mengakibatkan peningkatan *fiscal stress*. Adanya ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan masyarakat dan pelayanan yang diberikan pemerintah berdasarkan data yang tersedia menyebabkan *fiscal stress* (Septira, dkk. 2019).

Menurut Skidmore & Scorsone (2011), berikut ini formula yang dapat digunakan untuk mengukur

$$\boxed{\text{Fiscal Stress} = \text{Indeks Belanja Pelayanan Pemerintah} - \text{Indeks Pendapatan Pemerintah}} \\ \text{fiscal stress.}$$

### **Diversifikasi Pendapatan Daerah**

Berdasarkan KBBI, diversifikasi adalah penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Diversifikasi pendapatan daerah adalah kondisi dimana pemerintah daerah memperoleh akses ke opsi pendapatan tambahan, yang akan meningkatkan pendapatan,

sehingga dengan demikian belanja-belanja, melebihi apa yang diharapkan oleh masyarakat (Sjöquist & Stoycheva, 2012). Shamsudin & Akoto (2004) menyatakan bahwa diversifikasi sumber pendapatan pemerintah daerah sangat penting untuk mengurangi *fiscal stress*.

Menurut Iciah, dkk. (2021), berikut ini formula yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran diversifikasi pendapatan daerah.

$$\text{Diversifikasi Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Lain-lain PAD yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$H_1$  : Diduga Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

#### Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi dan untuk mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mana dana ini dialokasikan dari pendapatan APBN. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan adalah pendapatan daerah yang didistribusikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai seluruh kegiatan daerah yang bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah agar suatu daerah tidak merasakan kesenjangan sosial (Dewata et al., 2021).

$H_2$  : Diduga Dana Perimbangan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan hubungan kausal. Data sekunder yang digunakan berupa LKPD Provinsi di Indonesia. Populasi penelitian terdiri dari 38 Provinsi di Indonesia yang masing-masing mempublikasikan laporan keuangan tahunannya di [www.eppid.bpk.go.id](http://www.eppid.bpk.go.id). Sebanyak 145 sampel dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya secara rutin dari tahun 2018-2022 di situs web BPK RI dan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang tidak termasuk dalam keistimewaan/otonomi khusus. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial menggunakan aplikasi EViews versi 13.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Pemilihan Model Data Panel

###### a) Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.256236	(28,114)	0.0000
Cross-section Chi-square	218.140567	28	0.0000

Sumber: Output Eviews 13

Tabel 1 menunjukkan nilai *probability* sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

###### b) Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.389751	2	0.0000

Sumber: Output Eviews 13

Tabel 2 menunjukkan nilai *probability* sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka model yang terpilih dari uji hausman ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil menunjukkan estimasi model *Fixed Effect* pada Uji Chow dan juga pada Uji Hausman, maka tidak perlu dilakukan Uji *Langrange Multiplier* (LM), karena model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **a) Uji Normalitas**

Menurut Basuki dan Prawoto (2019), tidak semua uji asumsi klasik harus diujikan pada setiap model regresi linear dimana uji normalitas pada dasarnya bukan merupakan syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.

#### **b) Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2
X1	1.000000	0.157034
X2	0.157034	1.000000

Sumber: Output Eviews 13

Tabel 3 menunjukkan nilai koefisien korelasi variabel Diversifikasi Pendapatan Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) sebesar  $0.157034 < 0.90$ . Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinieritas atau lolos uji multikolinearitas.

#### **c) Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.015610	1.578994	0.009886	0.9921
X1	0.771228	0.741951	1.039460	0.3008
X2	0.000692	0.054318	0.012733	0.9899

Sumber: Output Eviews 13

Tabel 4 menunjukkan variabel Diversifikasi Pendapatan Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai probabilitas  $0.3008 > 0.05$  sedangkan variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) memiliki nilai probabilitas  $0.9899 > 0.05$ . Sehingga baik Diversifikasi Pendapatan Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

### **Analisis Regresi Berganda Data Panel**

**Tabel 5. Hasil Regresi Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	23.13824	8.461587	0.0000
Diversifikasi Pendapatan Daerah	-1.616316	-1.257920	0.2110
Dana Perimbangan	0.209719	2.229441	0.0277
R-square	0.972283		
Adjusted R-squared	0.964989		
F-statistic	133.2995		
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 13

Tabel 5 menunjukkan nilai konstanta sebesar 23.1382 yang artinya jika tanpa adanya nilai variabel bebas (independen) diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan, maka diketahui bahwa akan mengalami peningkatan variabel terikat (dependen) *fiscal stress* sebesar 23.1382. Nilai koefisien beta variabel diversifikasi pendapatan daerah bernilai negatif sebesar -1.6163 artinya bahwa setiap kenaikan variabel bebas (independen) diversifikasi pendapatan daerah sebesar 1% maka variabel *fiscal stress* mengalami penurunan sebesar 1,61. Nilai koefisien beta variabel dana perimbangan bernilai positif sebesar 0.2097 artinya bahwa setiap kenaikan variabel bebas (independen) dana perimbangan sebesar 1% maka variabel *fiscal stress* mengalami kenaikan sebesar 0.2097.

Tabel 5 menunjukkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.964989 atau 96,49%. Variabel terikat dapat menjelaskan variabel bebas sebesar 96,49%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 5 menunjukkan secara parsial variabel  $X_1$  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Diperoleh nilai  $t_{hitung}$  variabel  $X_1$  sebesar  $1.257920 < t_{tabel} 1.97693$  dan nilai sig.  $0.2110 > 0.05$ . Hasil tersebut menyebabkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Nilai  $t_{hitung}$  variabel  $X_2$  sebesar  $2.229441 > t_{tabel} 1.97693$  dan nilai sig.  $0.0277 < 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel  $X_2$  berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil ini memberikan kepercayaan pada hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ) dan membantah hipotesis ( $H_{03}$ ).

### Pembahasan

#### Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $1.257920 > 1.97693$ ) dan nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ( $0.2110 > 0.05$ ). Karena  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima yang artinya hipotesis penelitian  $H_1$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan daerah tidak mempengaruhi *fiscal stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, diversifikasi pendapatan daerah dicerminkan melalui Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masih sangat kecil yaitu dengan rata-rata hanya sebesar 4,82% dari total Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, diversifikasi pendapatan daerah dianggap tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, sehingga tingkat *fiscal stress* tidak terpengaruh. Contohnya, pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 menganggarkan Pendapatan dari Penyelenggaraan dan Pendidikan Pelatihan sebesar Rp 6.365.065.060 dengan realisasi sebesar Rp 2.199.950.000 atau 34,56%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 1.809.895.000 atau 45,13% dibanding dengan realisasi tahun 2017 yaitu Rp 4.009.845.000. Penyebab lain rendahnya persentase Diversifikasi Pendapatan Daerah yaitu kurang optimalnya target capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, misalnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2021 kurang optimal mencapai target dari Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, pendapatan denda PKB, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda BBNKB, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Icih, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa diversifikasi pendapatan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa diversifikasi pendapatan daerah di 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2019 hanya berkontribusi 10% dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriana, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh megatif terhadap *fiscal stress*, karena penelitiannya menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan daerah tidak mampu mengatasi *fiscal stress* karena nilainya yang negatif.

Implikasi teori *stewardship* pada diversifikasi pendapatan daerah terhadap *fiscal stress* pada efisiensi dalam mengelola Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan menerapkan teori *stewardship* pada diversifikasi pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko *fiscal stress* dan meningkatkan keberlanjutan keuangan. Teori *stewardship* mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan agar tidak bergantung hanya pada satu atau dua pendapatan utama. Melalui pendekatan *stewardship* pada diversifikasi pendapatan daerah, pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi *fiscal stress* dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dan mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Implikasi teori *stewardship* ini relevan dalam menghadapi tantangan keuangan dan meningkatkan ketahanan serta kemandirian keuangan pemerintah daerah.

#### Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap *Fiscal Stress*

Hipotesis kedua diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat telah digunakan secara efektif dan efisien oleh daerah, yang menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut telah mencapai tujuan untuk kepentingan publik dan telah digunakan untuk menghasilkan *output* yang berdaya guna dan maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fiscal stress*.

Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septi Suryani (2023), yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Hal tersebut juga didukung oleh Aman (2017) yang membuktikan bahwa *fiscal stress* pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh dana perimbangan.

Implikasi teori *stewardship* pada dana perimbangan terhadap *fiscal stress* dalam mengelola dana perimbangan untuk mengurangi risiko *fiscal stress* dan meningkatkan keberlanjutan pemerintah daerah. Teori *stewardship* mendorong efisiensi dalam penggunaan dana perimbangan, pemerintah daerah harus berupaya untuk memanfaatkan dana perimbangan dengan sebaik-baiknya dan mengalokasikannya pada program dan proyek yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penggunaan dana perimbangan yang efisien dapat membantu mengurangi risiko *fiscal stress* dengan memaksimalkan hasil dari setiap dana

yang diterima. Melalui teori *stewardship*, pemerintah daerah dapat lebih siap dalam menghadapi *fiscal stress* dengan mengelola dana perimbangan secara bertanggung jawab dan efisien. Implikasi teori *stewardship* ini relevan dalam menghadapi tantangan keuangan dan meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah terhadap risiko *fiscal stress*.

#### **Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap *Fiscal Stress***

Hipotesis ketiga diterima yaitu diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *fiscal stress*. *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) adalah 96,49%, hal ini menjelaskan bahwa pendapatan daerah dan dana perimbangan terhadap *fiscal stress* sangat erat. Semakin tinggi keberhasilan suatu daerah untuk mendiversifikasi pendapatannya dengan baik mencerminkan peningkatan produktivitas suatu daerah dan pendapatan daerahnya.

Diversifikasi pendapatan daerah berbanding terbalik dengan *fiscal stress* karena semakin besar diversifikasi pendapatan daerah maka dapat mengurangi kondisi *fiscal stress* karena mampunya suatu daerah tersebut dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Semakin besar dana perimbangan dialokasikan Pemerintah Pusat sudah dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut sudah menghasilkan *output* yang berdaya guna dan maksimal.

Implikasi teori *stewardship* pada diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan terhadap *fiscal stress* mencakup pendekatan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan dalam mengelola semua aspek keuangan tersebut. Dengan menerapkan teori *stewardship* pada semua elemen tersebut, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko *fiscal stress* dan meningkatkan ketahanan keuangan. Pada efisiensi pengelolaan pendapatan, teori *Stewardship* mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan dan menggali sumber pendapatan yang lebih beragam. Adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan keberagaman dari pendapatan asli daerah dapat membantu mendongkrak pendapatan daerah, utamanya yaitu untuk meningkatkan keberagaman dari pendapatan asli daerah guna menanggulangi kondisi *fiscal stress*.

Pada transparansi dan akuntabilitas dana perimbangan, teori *stewardship* mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perimbangan. Pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang penggunaan dana perimbangan secara jelas dan mudah diakses kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, keputusan penggunaan dana perimbangan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik. Pada efisiensi penggunaan dana perimbangan, teori *stewardship* mendorong efisiensi dalam penggunaan dana perimbangan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk memanfaatkan dana perimbangan dengan sebaik-baiknya dan mengalokasikannya pada program dan proyek yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penggunaan dana perimbangan yang efisien dapat membantu mengurangi risiko *fiscal stress* dengan memaksimalkan hasil setiap dana yang diterima.

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Diversifikasi pendapatan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fiscal stress*. Dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan variabel diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinan sebesar 0,964989 atau 96,49%. Hal ini berarti sebesar 96,49% variabel mengenai *fiscal stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh diversifikasi pendapatan daerah dan variabel lain dalam penelitian ini sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Upaya pemerintah untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan daerah dan pengelolaan alokasi dana perimbangan dengan tepat dapat mengurangi *fiscal stress*.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adriana, M., Muthia, Y., Dan, B., & Indrawati, N. (2017). Variabel yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 25).
- Aman. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan PDRB Terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
- Arnett, S., Willoughby, K., Young, A. A., Hildreth, W. B., Sjoquist, D., Searcy, C., & Melkers, J. (2011). *Fiscal Stress In The U.S. States: An Analysis Of Measures And Responses A Dissertation Presented To The Academic Faculty Copyright 2011 By Sarah Arnett Fiscal Stress In The U.S. States: An Analysis Of Measures And Responses Acknowledgements.*

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2018. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2019. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2020. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2021. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2022. Jakarta: BPK-RI
- Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Dinapoli, T. P. (2017). *Office of the New York State Comptroller Fiscal Stress Monitoring System © School Districts in Stress Fiscal Years Ending 2016 Avoid Crisis Tomorrow with Fiscal Awareness Strategies for Today Learn more about the System and Scoring Significant Stress Moderate Stress.*
- Donaldson, L., & Davis, J.H. (1997). *Stewardship Theory or Agency Theory: June 1991*, 49-65.
- Eger, R. J., Matkin, D. S. T., & Weissert, C. S. (n.d.). *Who Pays The Price For Fiscal Stress Evidence From Expenditure Cutbacks In Florida Counties.*
- Firstanto, R., & F. Firmansyah. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pad, Pdrb, Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
- Icih, Kurniawan, A., & Fadillah, R. (2021). *The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of GDP, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization And Diversification Of Regional Income On Fiscal Stress. Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 34–53. <https://doi.org/10.35310/jass.v3i02.896>
- Kementerian Keuangan. (2023). Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023. Jakarta: Dep. Keuangan
- Kementerian Keuangan. (2024). Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Dep. Keuangan
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (n.d.). Bagaimana Pemerintah daerah merespon *Fiscal Stress*?
- Mahifa, I., & Dra. Sri handaru Yuliati, M. B. A. (2010). Pengaruh Komposisi PAD, Diversifikasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Dana Tabungan Pemerintah Daerah terhadap *Fiscal Stress* : Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991/1992-2001.
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (n.d.). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- Puspitawati, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Puspitorini, D. (2022). *Variables Affecting Fiscal Stress in Regency/City of Aceh Province 2016-2019 Period*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5522>
- Septi Suryani, S. (2023). Determinants Of Fiscal Stress On Local Government Finances In East Java. <Http://Ijsr.Internationaljournallabs.Com/Index.Php/Ijsr>
- Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fiscal Stress*. 7(1), 57–64. <https://doi.org/10.17509/jpak.v%vi%.15949>
- Shamsuh, H., & Akoto, J. B. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(1), 40–61. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-16-01-2004-b003>
- Sjoquist, D. L., & Stoycheva, R. (2012). Local Revenue Diversification: User Charges, Sales Taxes, And Income Taxes. In *The Oxford Handbook Of State And Local Government Finance* (Pp. 429–462). Oxford University Press. <Https://Doi.Org/10.1093/Oxfordhb/9780199765362.013.0017>
- Skidmore, M., & Scorsone, E. (2011). Causes and consequences of fiscal stress in Michigan cities. *Regional Science and Urban Economics*, 41(4), 360–371. <https://doi.org/10.1016/j.resciurbeco.2011.02.007>
- Ulfa Q, M., Haryadi, H., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 189–198. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.12908>

Undang-Undang Nomor 11. (2006). Tentang Pemerintahan Aceh  
Undang-Undang Nomor 13. (2012). Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  
Undang-Undang Nomor 29. (2007). Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 33. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.